

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN POLITIK MAHATMA GANDHI TENTANG AHIMSA DAN SATYAGRAHA TERHADAP KEKERASAN STRUKTURAL DI INDONESIA

4.1. Kekerasan Struktural Yang Terjadi di India Semasa Gandhi Hidup

Beberapa kekerasan yang terjadi di India semasa Gandhi hidup memiliki bermacam – macam bentuk dan mempunyai berbagai macam pelaku. Beberapa diantaranya adalah kasus monopoli garam oleh Pemerintah Inggris serta penjajahannya. Kemudian ada kasus yang berurusan dengan sistem keagamaan yang telah menjadi sistem sosial India lama yaitu sistem kasta. Selanjutnya ada lagi kasus kekerasan yang memakan korban cukup banyak , menyebabkan India berlumur oleh darah yaitu kasus kekerasan agama Umat Hindu dengan Umat Muslim pada awal kemerdekaan India dan Pakistan.

Di bawah undang- undang garam, Pemerintah Inggris menikmati monopoli atas tambang garam , memungut pajak atas penggunaan garam, melarang orang-orang India untuk membuat garam sendiri atau melarang mereka untuk menggunakan garam. Sebagian besar orang-orang India tinggal di wilayah-wilayah yang tidak jauh dari laut dan mereka bisa membuat garam sendiri dengan mudah, dengan cara mengeringkan air laut di bawah sinar matahari. Bagi orang India, garam itu sama pentingnya dengan udara dan air. Karena kebanyakan dari mereka bekerja sepanjang waktu di lading-ladang dibawah sinar matahari yang sangat terik

dan hanya memakan miju-miju, roti, dan garam. Gandhi menganggap bahwa pajak yang diberlakukan pada garam setara dengan pajak atas darah dan keringat.¹

Gandhi memutuskan kekerasan struktural ini sebagai momentum untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Semua ini akan jadi perang tanpa senjata. Gandhi menulis kepada British Viceroy bahwa ia bermaksud untuk menggulirkan perlawanan tanpa kekerasan dengan bergerak menuju laut untuk melanggar undang-undang monopoli garam. Gandhi menambahkan bahwa ia akan menerima konsekuensinya dengan gembira dan bahwa ia mengundang seluruh India untuk melakukan hal yang sama.²

Gerakan ini disebut dengan The Salt March. Gandhi membutuhkan waktu selama empat belas hari untuk mencapai laut. Ia berhenti di setiap desa untuk melakukan kampanye. Gandhi meningkatkan kembali rasa percaya diri orang-orang India akan bangsanya. Pada saat ia tiba dilautan, kelompok yang mengikutinya sudah sejumlah ribuan orang dan India berhasil menjadi sorotan dunia.

Dengan cara seperti ini lah Gandhi menghadapi berbagai macam kekerasan. Termasuk kekerasan struktural yang dilakukan pemerintah Inggris dengan menggunakan undang – undang nya. Gandhi melawan dengan caranya sendiri. Ia ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa ada orang banyak yang menderita ditengah bangsa kulit putih yang sedang memakan sumber daya bangsa lain. Tetapi hal yang paling esensial perlawanannya Gandhi terhadap Pemerintah Inggris

¹ Vad Metha.2011.*Ajaran-ajaran Mahatma Gandhi*.Pustaka Pelajar : Yogyakarta.Hal 301.

² Eknath Easwaran.2013.*Gandhi the Man*.Yogyakarta:Bentang.Hal.2.

melalui The Salt March adalah untuk menyadarkan dan menyentuh hati nurani dari Pemerintah Inggris itu sendiri , setelah melihat perjuangan bangsa India yang rela diperlakukan kasar sekalipun.

Satyagraha ingin memperlihatkan adanya kesalahan pada Pemerintah Inggris yang memandang India hanya sebagai pemuas kebutuhan Inggris. Sekaligus ingin menyadarkan betapa hebatnya bangsa India apabila Bersatu dalam melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Pelaku kekerasan struktural pemerintah Inggris dipaksa untuk melihat dirinya dan kebijakannya sendiri melalui perlawanan anti kekerasan.

Pada kasus lain juga diperlihatkan adanya kekerasan yang terlegitimasi oleh budaya, yaitu kekerasan kultural pada sistem kasta di India. Sistem kasta ini berawal dari sistem hukum India kuno, *Manusmriti*. Topik utama *Manusmriti* adalah tentang “tugas kodrati” (dharma) dari keempat “kasta” yang ada dalam masyarakat India. Keempat kasta yang dimaksud adalah :³

- Agamawan (*brahmana*)
- Prajurit dan bangsawan (*kshatriya*)
- Petani dan pedagang (*vaishya*)
- Hamba atau pekerja kasar (*sudhra*)

Struktur sosial inilah yang menjadi pedoman jalannya suatu masyarakat di

³ Martin Suryajaya.2016.*Sejarah Pemikiran Politik Klasik:dari Prasejarah hingga Abad ke-4 M*.Serpong:Marjin Kiri.Hal 311.

India. Dampak dari adanya sistem kasta ini, ada orang-orang yang juga tidak termasuk dalam kasta tersebut dan disebut dengan *paria*. Suatu kaum di India kuno yang lebih rendah dari kasta *sudhra*. Di mana orang-orang yang termasuk dalam kategori kau mini di anggap sama dengan binatang dan tidak dianggap sebagai manusia, sehingga bisa diperlakukan sesuka hati.

Gandhi yang melihat adanya dampak yang tidak adil dalam sistem kasta ini menghadapinya dengan memberikan pelayanan terhadap kaum tertindas. Karena baginya Tuhan tidak ada di rumah orang kaya tetapi di gubuk – gubuk orang miskin. Gandhi membangun sebuah ashram yaitu tempatnya melakukan pelayanan terhadap orang-orang yang tertindas. Pada mulanya sedikit sekali yang datang ke ashram itu karena berisi orang-orang dari kaum *paria*. Tetapi lama kelamaan setelah Gandhi meningkatkan derajat mereka dan mengganti sebutan dari kaum tersebut menjadi kaum *Harijan* berarti anak-anak Tuhan, Ashram itu kembali ramai didatangi orang-orang. Gandhi melakukan perjuangan nirkekerasan dan satyagrahanya melalui simbol-simbol yang dia tampilkan kepada masyarakat. Lewat itu, ia semakin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat. Kaum *Harijan* pun tidak terpinggirkan dan mulai diperhatikan kembali oleh masyarakat.

Selanjutnya di India juga pernah terjadi kekerasan yang sangat memakan banyak korban jiwa , yaitu kekerasan agama Hindu-Muslim. Adanya isu akan terjadi pemerintahan yang terikat dengan pusat yang kuat mengawali ketakutan kaum minoritas Muslim. Pemerintah Inggris yang sudah bersedia meninggalkan India melakukan diskusi bagaimana baiknya untuk memindahkan kekuasaan.

Ternyata adanya ketakutan dari Kaum minoritas ini menjadi peluang bagi pemimpin Kongres Liga Muslim untuk menginisiasi sebuah negara yang terpisah yaitu Pakistan.

Akhirnya pemisahan pun disetujui pemerintah Inggris dan Pakistan merdeka. Lalu terjadilah pada saat pemindahan dari satu daerah ke daerah lain. Titik yang mempertemukan antara umat Hindu dengan Muslim memuliah ketegangan. Kemudian terjadilah konflik horizontal yang menimbulkan banyak korban jiwa dan ribuan orang tinggal di jalanan tidak punya tempat tinggal.

Kekerasan struktural ini terjadi akibat situasi politik yang memanas juga. Karena adanya keinginan untuk membuat negara sendiri semakin memperluasnya jarak antara hubungan Hindu-Muslim. Gandhi hanya bisa meredam situasi konflik dengan melakukan puasa dan berkampanye tentang nasionalisme ketimuran yang anti kekerasan. Beberapa kali Gandhi hampir mengorbankan nyawanya karena teralalu lama berpuasa dan kekurangan gizi yang cukup akibat konflik Hindu-Muslim yang memanas dan berjalan cukup lama.

Gandhi sendiri akhirnya meninggal dengan tiga peluru tajam yang menembus badannya. Gandhi tewas oleh seorang ekstrimis Hindu yang tidak setuju dengan Gandhi memperlakukan umat Muslim dengan baik. Ia ingin segera menyingkahkan umat Muslim dari India.

4.2. Kekerasan Struktural di Indonesia

Kekerasan struktural yang terjadi di Indonesia memiliki bentuk yang bermacam-macam. Dimulai dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kekerasan beragama. Kekerasan beragama di Indonesia tidak terlepas dari intoleransi beragama yang meningkat belakangan tahun terakhir ini. Apalagi setelah terjadinya Pilkada Jakarta pada tahun 2014. Setelah momen mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahya Purnama dipidana dalam kasus penodaan agama yang kebetulan berasal dari kelompok minoritas. Kekerasan di Indonesia mengalami eskalasi yang terus bergerak. Indeks demokrasi di Indonesia ikut menurun bisa dilihat dari data Democracy Index dari *The Economist Intelligence*.

Tabel 4.1

Indeks Demokrasi Indonesia⁴



Berdasarkan laporan tersebut, indeks demokrasi di Indonesia memperlihatkan tren menurun dari 2014 hingga 2017. Pada 2014, tercatat nilai indeks sebesar 6,95 dan naik menjadi 7,03 pada 2015. Namun, angka ini terus turun menjadi 6,97 pada 2016 dan turun sangat signifikan di 2017 dengan skor 6,39. Hal

⁴ <https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-cEPz> di download pada 19 juni 2019

ini membuat Indonesia menjadi negara dengan performa terburuk pada 2017, turun 20 peringkat dari ranking ke-48 menjadi 68 di tingkat global.⁵

Adapun data yang menempatkan beberapa kota besar seperti kota Jakarta masuk dalam kota terintoleran ,Menurut data dari setara institute pada tahun 2018.

Tabel 4.2

10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah⁶

Peringkat	Kota	Skor
85	Sabang	3.757
86	Medan	3.710
87	Makassar	3.637
88	Bogor	3.533
89	Depok	3.490
90	Padang	3.450
91	Cilegon	3.420
92	Jakarta	2.880
93	Banda Aceh	2.830
94	Tanjung Balai	2.817

Ditengah kondisi politik yang semakin memanas dalam Pemilihan Presiden 2019 Jakarta masih diselimuti oleh rendahnya intoleransi yang diawali dari Pilkada Jakarta hingga saat ini.Pemimpin politik mempunyai peran sentral dalam menanggulangi masalah tersebut.

Fenomena kekerasan struktural pemerintah dalam kekerasan beragama dapat dilihat dari beberapa kasus yang memperlihatkan adanya ketidakhadiran

⁵ <https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-cEPz> di download pada 19 juni 2019

⁶ Setara Institute. 2018. *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran di Indonesia Tahun 2018*.Setra Institute : Jakarta.

negara dalam mendinginkan suatu konflik atau mencegah adanya situasi konflik. Jamaah Ahmadiyah Indonesia merupakan organisasi yang secara resmi terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JA 5/23/13 tanggal 13 maret 1953, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 31 Maret 1953. Dalam sejarahnya, pengikut Ahmadiyah terus menjadi sasaran kekerasan dan pengusiran karena dianggap mengamalkan dan menyebarkan ajaran agama sesat. Dalam catatan ELSAM, kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah mulai muncul pada tahun 2001 ketika terjadi perusakan rumah dan masjid hingga pembunuhan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Sambi Elen, Nusa Tenggara Barat. Sejak saat itu kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah frekuensinya terus meningkat.⁷

Kasus terbaru terjadi pada 20 Mei 2018, puluhan jamaah Ahmadiyah diusir dari rumahnya sendiri saat sekelompok orang melakukan tindakan pengrusakan terhadap rumah mereka di Desa Gereng, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. 24 orang penganut Ahmadiyah di desa itu di evakuasi oleh polisi ke Kantor Polres Lombok Timur dan masih menginap di Kantor Polres Lombok Timur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa di rezim demokrasi pun masih ada kekerasan struktural melalui tindakan pemerintah yang membiarkan atau malah melegitimasi kekerasan struktural. Padahal sudah jelas didalam sila kedua Pancasila dan Pasal 29 ayat (2) 1945 menegaskan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan

⁷ Pusat Dokumentasi ELSAM, *”Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Agama Minoritas.*

mereka masing-masing.” Jaminan konstitusional tersebut diperkuat dengan Pasal 28E Ayat (1 & 2) , UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

4.2. Analisa Pemikiran Politik Mahatma Gandhi tentang Ahimsa dan Satyagraha Terhadap Kekerasan Struktural Berupa Kekerasan Agama di Indonesia

Berbeda dengan kekerasan pribadi kuno, kekerasan besar itu nyaris tidak terlihat. Itu tersembunyi di belakang jalinan aturan, tidak pernah dipamerkan secara kasar tetapi tidak pernah secara halus ditampilkan secara berkala, resmi sehingga tidak spesifik individu dapat disalahkan karena melakukan itu, dibagi untuk mengelolanya atas nama negara agar warganya tidak pernah memahami skala besarnya. Semua ini menciptakan ilusi berbahaya bahwa negara modern telah menghilangkan kekerasan padahal sebenarnya telah meningkat.⁸

Kutipan dari Gandhi tersebut menunjukkan bentuk kekerasan pada zaman modern lebih halus dan tidak mudah dilihat dengan adanya kekerasan struktural. Seperti apa yang didefinisikan oleh Johan Galtung yang juga terinspirasi dari hidup Mahatma Gandhi tentang kekerasan. Kekerasan struktural saling terkait dengan kekerasan langsung.

Pada kasus Ahmadiyah, terlihat peran negara dalam kekerasan struktural. Di kasus Ahmadiyah pemerintah membiarkan kekerasan terjadi, sehingga terus

⁸ Bhikhu Parekh. 1989. *Gandhi's Political Philosophy*. London: Macmilan Academic and Professional LTD. Hal 112.

berulang dan merugikan kelompok minoritas. Malah justru melegitimasi diskriminasi dan kekerasan structural pada kelompok minoritas. Hal itu terbukti dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 199 Tahun 2008. Surat Keputusan Bersama ini memperingatkan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam.

Dalam prakteknya ternyata ada keputusan dalam peradilan yang tidak adil. Menurut Elsam. Pada 6 Februari 2011, massa menyerang warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Akibatnya, 3 warga Ahmadiyah tewas, 6 orang luka berat. Seorang korban di hukum selama 6 bulan penjara sementara 12 pelaku justru mendapatkan hukuman yang lebih ringan yaitu 3 – 6 bulan penjara. Kekerasan ini memicu banyak kekerasan lain yang terjadi pada jamaa Ahmadiyah di banyak daerah lain. Sedangkan, pada kasus pembubaran HTI yang tersangkut Perppu Ormas. Opsi pembubaran HTI melalui proses pengadilan pun tidak diperbolehkan dikarenakan alasan radikalisme.

Gandhi dalam pemikiran politiknya tentang Satyagraha memiliki pandangan bahwa dalam bernegara baiknya melihat manusia sebagai manusia yang memiliki percikan Tuhan dalam setiap orang. Sehingga, serendah apapun orang itu harus dipandang dan diperlakukan secara manusiawi. Dalam menyelesaikan konflik Gandhi memiliki beberapa dasar yang harus dilakukan dalam Satyagraha. *Pertama*, setiap orang harus memasuki diskusi dalam keadaan pikiran

terbuka dan kerendahan hati karena tidak ada kebenaran mutlak. *Kedua*, setiap orang harus mengurangi egonya dan mencoba saling memahami. *Ketiga*, untuk menghadirkan dialog yang rasional dan objektif selayaknya masing-masing tidak boleh berprasangka terlebih dahulu dan membenci satu sama lain.⁹

Dalam konteks kasus yang terjadi, seharusnya pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan orang-orang yang berkonflik apabila ingin menghasilkan suatu kebijakan yang baik. Kebijakan yang mencapai kebenaran bersama bagi semua pihak. Pemerintah harus memandang masyarakatnya secara manusiawi, bukan hanya memandang sebagai produk penghasil kekuasaan. Selama kelompok-kelompok tersebut tidak melakukan kekerasan dan selalu berada dalam lingkup konstitusi.

Pembiaran dan legitimasi yang diberikan memberikan dampak buruk bagi kelompok minoritas. Kekerasan structural mulai berubah menjadi kekerasan langsung seperti contoh Ahmadiyah. Yang seharusnya negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya justru malah berbalik merugikan warga negaranya. Jemaah Ahmadiyah berstatus resmi warga negara. Sebagai warga negara, mereka wajib membayar pajak, mematuhi hukum, mengikuti anjuran pemerintah. Mereka tidak boleh menghadapi kekerasan dengan kekerasan, dan mesti menyerahkannya kepada hukum yang berlaku

⁹ Bhikhu Parekh. 1989. *Gandhi's Political Philosophy*. London: Macmilan Academic and Professional LTD. Hal 112.

Namun kepatuhan dan ketaatan itu tidak selalu diganjar dengan tindakan nyata negara untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan alasan keadaan darurat atau untuk mengantisipasi reaksi keras lanjutan dari kelompok yang mengaku diri mayoritas, negara cenderung membiarkan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Negara sering menerapkan kebijakan utilitaristis. Yakni kebijakan yang cenderung membenarkan ketidakadilan terhadap kaum minoritas untuk menghindari reaksi negative dari kelompok mayoritas.

Kebijakan utilitaristis sangat ditentang oleh Gandhi. Gandhi tidak setuju dengan kebijakan hanya menguntungkan banyak orang. Ia selalu menekankan akan hadirnya kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Karena memandang manusia hanya sebagai alat, tidak memandang manusia sebagai manusia. Gandhi menulis, "Kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa seorang penganut ahimsa yang setia akan senantiasa berjuang demi mewujudkan kebaikan terbesar untuk semuanya, dan dia rela mati untuk mewujudkan cita-citanya itu."¹⁰

Kebijakan pemerintah sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip yang dianut oleh Gandhi serta pandangan politiknya. Pandangan Gandhi berazaskan Satyagraha dan Ahimsa yang menekankan adanya dialog dan saling menghormati dan menghargai sesama manusia yang sebagian dirinya merupakan percikan Tuhan. Maka dari itu, diperlukannya kembali nilai-nilai ketimuran yang sudah ada dalam tubuh Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Ketika nilai-nilai ini kembali

¹⁰ Francis Alappatt. 2005. *Mahatma Gandhi: Prinsip Hidup, Pemikiran Politik dan Konsep Ekonomi*. Nusamedia : Bandung. Hal 79.

ditegakkan , Gandhi pun ikut bersuara bersama pendiri-pendiri bangsa untuk membela semua pihak untuk kebaikan bersama.